

## Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan

**Fadil Ainur Rif'an**<sup>1</sup>

Peneliti Independen, Palembang, Indonesia

### Abstract

This study describes the pattern of relations between identity politics and voter behavior at the local level in contemporary Indonesia. This study focuses on the widespread use of religion-based identity politics used by supporters of presidential and vice-presidential candidates and its influence on voter behavior in urban communities in Palembang City in the 2019 Presidential Election. Qualitative research, this study aims to answer the following two key questions. First, how is religion-based identity politics used to mobilize voters in the 2019 Presidential Election in Palembang City? and how does the use of identity politics affect voter behavior in the city of Palembang in the 2019 presidential election? The results of this study found two things. First, religion-based identity politics was used in a structured and systematic way in the 2019 presidential election by local religious leaders who supported the No. 2 pair, namely Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. The politicization of religious symbols in the pulpits of da'wah and the use of verses from the Qur'an and Hadith are used to build public discourse that providing support to couple No. 2 is part of the struggle and jihad to defend Allah's religion. Second, the use of ulama and religious verses as instrumentation in the campaign has influenced public opinion and preference in the 2019 presidential election, both from the upper-middle class and lower-class groups in Palembang City.

Studi ini menjelaskan tentang pola relasi antara politik identitas dan perilaku pemilih di tingkat lokal Indonesia kontemporer. Studi ini berfokus kepada merebaknya penggunaan politik identitas berbasis agama yang digunakan oleh para pendukung kandidat presiden dan wakil presiden dan pengaruhnya terhadap perilaku pemilih pada masyarakat urban di Kota Palembang pada Pilpres 2019. Dengan menggunakan teori politik identitas dan perilaku pemilih sebagai kerangka analisis, serta memanfaatkan metode penelitian kualitatif, studi ini hendak menjawab dua pertanyaan kunci berikut. Pertama, bagaimana politik identitas berbasis agama digunakan untuk mobilisasi suara pada Pilpres 2019 di Kota Palembang? dan bagaimana pengaruh penggunaan politik identitas tersebut terhadap perilaku pemilih di Kota Palembang pada Pilpres 2019? Hasil penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, politik identitas berbasis agama digunakan secara terstruktur dan sistematis pada Pilpres 2019 oleh para tokoh agama lokal yang mendukung pasangan No 2, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Politisasi simbol-simbol agama dalam mimbar-mimbar dakwah dan penggunaan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist digunakan untuk membangun diskursus publik bahwa memberikan dukungan kepada pasangan No 2 merupakan bagian dari perjuangan dan jihad membela agama Allah. Kedua, penggunaan ulama dan ayat-ayat agama sebagai instrumentasi dalam kampanye telah berpengaruh pada penggiringan opini dan preferensi publik pada Pilpres 2019, baik dari kelompok kelas menengah atas maupun kelas bawah di Kota Palembang.

**Keywords:** Politik Identitas, Perilaku Pemilih, Pilpres 2019, Palembang, Sumatera Selatan

<sup>1</sup> Peneliti Independen, Palembang, Indonesia (fadilrifan1807@gmail.com)

## Pendahuluan

Pasca reformasi dinamika politik di Indonesia diwarnai oleh merebaknya penggunaan politik Identitas sebagai instrumen untuk membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku publik, mengeksklusi kelompok masyarakat tertentu, dan merebut kekuasaan politik (Maarif, 2010). Dalam perkembangannya, fenomena penggunaan politik identitas semakin masif dan menguat dalam politik elektoral di Indonesia sejak berlangsungnya persaingan sengit memperebutkan kursi presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Ini semakin mendapatkan kulminasinya ketika kontestasi pada Pilpres 2019 kembali mengulang rivalitas antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Perbedaannya, pada Pilpres 2019 penggunaan politik identitas berbasis agama semakin menguat yang dipengaruhi oleh semakin merapatnya barisan ulama konservatif yang memberikan dukungan politik pada pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan dalam konteks ini, sejumlah ulama tersebut mengadakan Ijtima' Ulama dan rangkaian

Perbedaannya, yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2019 ini kedua pasangan calon menggunakan politik identitas sebagai suatu cara untuk mendapatkan suara dari para pemilih, diawali dengan adanya Ijtima' Ulama dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto, adanya isu-isu yang sering diberitakan yakni isu PKI, kriminalisasi ulama, isu tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok (Wardah VOA, 2018). Puncaknya terjadi pada saat kampanye akbar pasangan Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno tanggal 7 April 2019, yang diawali dengan Shalat Tahajud berjamaah dilanjutkan dengan Shalat Subuh berjamaah, dzikir dan tausiyah oleh sejumlah ulama sebelum pidato

kebangsaan oleh calon Presiden Prabowo Subianto.

Argumen yang mendasar terhadap narasi tersebut adalah dengan melihat kondisi faktual penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Melihat serta merasakan isu yang selalu diberitakan tersebut membuat pihak Joko Widodo merespon dengan cara menggandeng Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Akan tetapi, isu dan kondisi tersebut tidak terjadi di Jakarta saja, namun menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Kota Palembang yang menjadi tempat penelitian ini, sebagai suatu kota yang diyakini juga merasakan terjadinya politik identitas pada pemilihan umum (pemilu) Presiden tahun 2019. Palembang salah satu kota besar yang ada di Pulau Sumatera, sekaligus mempunyai penduduk yang beraneka ragam bentuk dari segi etnis maupun agama. Kota Palembang pada tahun 2018 mempunyai beberapa jenis etnis ataupun suku seperti Suku Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, dan Pegagan ([indonesia.go.id](http://indonesia.go.id), 2020). Jumlah pemeluk agama di Kota Palembang yakni Islam (1.585.176), Kristen (51.811), Katolik (26.853), Hindu (1.417), Budha (62.698), Konghucu (0) (Kanwil Kemenag Sumsel, 2019).

Sebagaimana diketahui, dari data di atas menunjukkan bahwa Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang jumlah etnis dan pemeluk agamanya sangat beragam, dan ini menjadikan Palembang kota yang sangat rawan terhadap masuknya politik identitas. Dalam sejarahnya Kota Palembang tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang dibawa para pedagang. Setidaknya ada tiga komunitas

masyarakat Palembang yang sampai dengan saat ini masih ada dan menjadi bukti sejarah terjadinya interaksi budaya antara penduduk lokal dengan warga pendatang dari luar (Farida, 2019, p. 51). Kampung Kapitan di Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I yang merupakan komunitas Tionghoa, Kampung Assegaf di 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II dihuni komunitas Arab (Orang Palembang menyebutnya Ayib), dan Tambi, keturunan India beragama Islam, yang tersebar di beberapa tempat di kota Palembang. Berbagai seni yang bernuansa Islam masih bertahan hingga saat ini yang dimainkan banyak kelompok di berbagai tempat seperti Hadroh, rebana. Atas adanya kondisi masyarakat tersebut pada akhirnya banyak politik identitas yang terjadi di Palembang menjelang pemilihan umum (Pemilu) Presiden tahun 2019.

Kota Palembang merasakan politik identitas berkembang dan menyebar dengan cepat, diawali adanya ijtima ulama yang dilakukan oleh beberapa ulama di Sumatera Selatan untuk menegaskan hasil dari Ijtima Ulama di Jakarta (Hidayatullah.com, 2018). Kemudian ada salah satu tokoh Agama Islam di Palembang mengadakan ceramah yang kemudian disebar melalui sosial media Youtube menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dari sosial media seperti Youtube, dan Instagram terdapat beragam reaksi dari masyarakat Kota Palembang, seperti mereka langsung memutuskan pilihannya untuk mendukung nomor urut 02 karena mengikuti pilihan dari tokoh Agama Islam tadi. Beredarnya video tersebut akhirnya memicu para tokoh agama Islam di Kota Palembang menyebarkan pilihan mereka kepada masyarakat (Kinanti, 2018). Identitas adalah suatu yang melekat dari setiap individu, seperti halnya identitas agama yang begitu melekat dan sangat

sensitif di masyarakat. Sehingga politisasi agama dapat begitu cepat berkembang dan menyebar di masyarakat terutama etnisitas dan agama, karena diyakini oleh para kandidat dan tim sukses menjadi cara termudah dan paling efektif menarik hati pemilih untuk memilih seorang kandidat. Karena etnisitas dan agama termasuk ikatan emosional pada identitas primordial yang dimiliki oleh setiap pemilih (Sahalatua, 2018, pp. 14-15). Penggunaan etnisitas dan agama sebagai bagian dari politik identitas juga dapat berdampak terhadap pola perilaku pemilih pada pemilihan Presiden 2019 ini, karena dapat mempengaruhi pilihan mereka terhadap calon pasangan presiden pada pemilihan Presiden 2019. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa, seorang individu dapat terpengaruh terhadap pilihan politiknya dengan adanya faktor sosiologis, demografis, serta pilihan rasional (Muhtadi, 2018, p. 14).

Adanya politik identitas yang digunakan pada pemilihan Presiden 2019 tentu semakin berpengaruh karena itu akan menjadi faktor terhadap keputusan yang akan mereka pilih pada saat pemilihan presiden 2019 nanti. Kota Palembang yang terdiri dari 18 Kecamatan serta 107 Kelurahan melakukan pemilihan suara untuk Pilpres 2019 ini. Namun, dalam studi ini didasarkan pada penelitian penulis di tiga Kelurahan yakni Kelurahan Talang Bubuk, Kelurahan 14 Ulu, dan Kelurahan Duku. Dari data hasil pemilu Pilpres 2019 di Kota Palembang untuk Kelurahan Talang Bubuk pasangan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin (2.231 atau sekitar 41.09% suara) sedangkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Salahuddin Uno (3.199 atau sekitar 58.91% suara), Kelurahan 14 Ulu pasangan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin (2.435 atau sekitar 34.38% suara) sedangkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Salahuddin Uno

(4.648 atau sekitar 65.62% suara), Kelurahan Duku pasangan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin (4.445 atau sekitar 51.17% suara) sedangkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Salahuddin Uno (4.442 atau sekitar 48.83% suara) (Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2019).

Ketiga kelurahan tersebut di atas termasuk wilayah yang mempunyai ragam etnis serta agama yang ada di Kota Palembang. Seperti Kelurahan Talang Bubuk termasuk wilayah abangan, kemudian Kelurahan 14 Ulu termasuk wilayah santri karena lingkungan di sekitarnya banyak terdapat pondok pesantren serta banyak ulama-ulama Islam setempat yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat, dan kelurahan Duku termasuk wilayah multi etnis karena terdapat warga tionghoa yang tinggal di wilayah tersebut. Menurut data diatas etnisitas dan agama menjadi sangat berpengaruh terhadap perolehan suara suatu pasangan calon pada Pilpres 2019 ini. Etnisitas dan agama menjadi bagian dari adanya politik identitas yang dapat dimobilisasi karena dalam etnisitas dan agama mempunyai stigmatisasi dan pelabelan bagi para pemilih. Oleh karena itu, studi yang dihasilkan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di tiga kelurahan di atas, memberikan memberikan fokus bahasan kepada identitas berbasis agama sebagai bentuk dari politik identitas dan pengaruhnya pada perilaku masyarakat pada pilpres 2019.

### **Mendiskusikan Politik Identitas dan Perilaku Pemilih.**

#### **Politik Identitas**

Politik identitas timbul karena adanya keinginan untuk diakui dan diperlakukan setara

atau adil, kemauan untuk menjaga nilai budaya dari masing-masing kelompok, dan karena rasa kesetiaan kepada etnisnya (Abdillah, 2002, p. 4). Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya (Buchari, 2014, p. 20).

Politik identitas secara teoritis adalah sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis serta agama sebagai suatu tanda maupun ciri khas dari setiap individu yang bersifat laten dan potensial, serta sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas adalah aktualisasi partisipasi politik, yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial (Buchari, 2014, p. 19). Politik Identitas (political of identity) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik. Politik identitas memang sangat identik kaitannya dengan etnis, identitas serta agama yang selalu diperjuangkan untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan, karena politik identitas muncul adanya kesamaan nasib yang dirasakan oleh para etnis, identitas serta penganut agama yang sama karena merasa dirugikan atas kebijakan yang diambil oleh penguasa suatu daerah maupun negara. Adanya kesamaan tersebut selalu memunculkan sebuah perbedaan yang dapat

memicu konflik dari adanya politik identitas (Setyaningrum, 2005, p. 19).

Perbedaan merupakan salah satu unsur penting dalam konteks memahami adanya suatu politik identitas. Selain itu, politik identitas akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik. Pada studi ini, teori politik identitas yang digunakan yakni menurut Ahmad Syafii Maarif. Menurut Ahmad Syafii Maarif, yang termasuk ke dalam teori politik identitas yaitu identitas etnis dan agama. Identitas yang digunakan pada studi ini adalah, identitas agama saja (Maarif, 2010, p. 20).

Politik identitas agama yang sering terjadi di Indonesia sering dilakukan oleh kelompok *mainstream*, yakni kelompok agama mayoritas dengan niat “menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya “menyimpang” atau “menyeleweng”. Hal ini dilakukan bukan hanya oleh warga sipil bahkan, negara juga ikut andil. Arus politik identitas agama terutama umat Islam di Indonesia, terutama diawali oleh kelompok fundamentalisme telah melahirkan tiga bentuk kekerasan, yakni Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi trauma, terluka, maupun terbunuh. Kedua, kekerasan simbolik yang berupa kekerasan semiotik seperti tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang melecehkan agama lainnya. Ketiga, kekerasan struktural yakni kekerasan yang dilakukan oleh Negara, baik itu menggunakan perangkat hukum maupun aparat Negara. Krisis identitas keagamaan mendorong terjadinya krisis moral (Maarif, 2010, p. 44).

Pola politik identitas menggunakan identitas agama di Indonesia yang dibangun dan bermunculan di banyak wilayah memperlihatkan kecenderungan dua pola yakni positif, negatif

bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok Islam yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Akibatnya, muncul istilah mendominasi lainnya, seperti yang pertama diunggulkan, diandalkan, disanjung-sanjung dan ditakhtakan, sedangkan yang lainnya direndahkan, dipinggirkan, dilecehkan. Akhirnya, muncul sebuah sebutan sesat berulang kali, yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang memiliki tafsir berbeda dari tafsir kelompok fundamentalisme yang pada akhirnya berbagai kasus kekerasan dan pemaksaanlah yang mengemuka (Maarif, 2010:47).

### **Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih merupakan gejala yang sangat kompleks. Keputusan untuk memilih ditentukan banyak faktor seperti faktor sosiologis, psikologis, serta *rational choice* atau pilihan rasional. Studi tentang perilaku pemilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti *parpol*. Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam

tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (Haryanto, 2014, p. 292).

Pertama, Pendekatan Sosiologis. Pendekatan dalam model sosiologis ini sebenarnya berasal dari Eropa, lalu kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan sosial Amerika Serikat. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. Perilaku pemilih itu sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam hal jenis kelamin, usia, etnis atau daerah tempat tinggal, agama, dan tingkat kesalehan, serta kelas sosial seperti yang diukur dari tempat tinggal di perkotaan versus pedesaan, tingkat pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan. Para cendekiawan dan politisi Indonesia telah memberikan perhatian paling utama kepada agama, etnisitas, dan kelas sosial, yang semuanya dianggap sebagai penggerak utama. Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan hanya dari bagian pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2009, p. 91).

Perilaku pemilih seseorang, cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini, yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal (Roth, 2009, pp. 24-25). Inti dari model sosiologis adalah kesamaan karakteristik sosial yang menentukan terhadap pilihan politik tersebut (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2009, p. 91). Faktor atau aspek dalam pendekatan

sosiologis yang mempengaruhi perilaku para pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu adalah (1) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan suku; (2) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan agama; (3) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan jenis kelamin; (4) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan latar belakang pendidikan; (5) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan latar belakang pekerjaan; (6) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan status ekonomi; (7) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan ikatan kekerabatan (Putriasafa, 2016, p. 35).

Kedua, Pendekatan Psikologis. Pendekatan dalam model psikologis merupakan fenomena yang berkembang di Amerika Serikat karena dikembangkan di Amerika Serikat melalui Survey Research Centre di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga bisa disebut sebagai mazhab Michigan. Pelopor pendekatan psikologis yakni August Campbell. Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap adanya pendekatan sosiologis. Karena pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit untuk diukur, seperti contohnya bagaimana cara untuk mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya (KPU Bondowoso; Lemlit UNEJ, 2015, p. 11). Berbeda halnya dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha

dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu atau utama (Roth, 2009, p. 27).

Pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu atau utama. Selain itu, pendekatan psikologis menganggap sikap menjadi pemicu yang sentral dalam mengambil keputusan serta menjelaskan pilihan politik seseorang. Hal ini juga disebabkan oleh adanya penjelasan fungsi sikap seperti yang diungkapkan oleh Greenstein yakni: Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya adalah, adanya penilaian terhadap suatu obyek yang diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya adalah, seseorang dapat bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak dengan tokoh yang dia segani atau tokoh panutannya. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya adalah, seseorang dapat bersikap tertentu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang terjadi di dalam dirinya, menjadi sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri (defence mechanism) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi (KPU Bondowoso; Lemlit UNEJ, 2015, p. 12). Kemudian ada orientasi terhadap isu atau tema. Orientasi terhadap isu atau tema merupakan suatu konseptualisasi pengaruh jangka pendek

yang diperkenalkan oleh pendekatan psikologis. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilih apabila memenuhi tiga persyaratan berikut ini (1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif. Faktor atau aspek dalam pendekatan psikologis yang mempengaruhi perilaku para pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu adalah (1) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan visi misi; (2) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan kampanye; (3) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan rekam jejak para calon; (4) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan slogan; (5) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan partai politik yang mengusung; (6) Pendapat masyarakat dalam memilih berdasarkan kepribadian sang calon (Putriasafa, 2016, p. 35).

Ketiga, Pendekatan Pilihan Rasional. Pendekatan dalam model pilihan rasional (Rational Choice). Penggunaan model pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih, sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi (KPU Bondowoso; Lemlit UNEJ, 2015, p. 17). Model ini merupakan upaya untuk menjelaskan perilaku memilih yang berhubungan dengan parameter ekonomi-politik. Maksudnya adalah jika asumsi pilihan rasional mampu menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik. Operasi model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni dipandu oleh

kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi (Haryanto, 2014, pp. 294-295). Apabila, secara ilmu ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, seperti menekan biaya sekecil-kecilnya untuk dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional dalam menentukan pilihan politik.

Para pemilih diasumsikan untuk mempunyai kemampuan dalam menilai isu-isu politik yang diajukan oleh para calon (kandidat), serta mampu menilai para calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau para calon kandidat ini bisa didasarkan pada penilaian seperti jabatan, informasi terhadap para calon, pribadi yang populer karena prestasi dibidang masing-masing seperti seni, olah raga, film, organisasi, politik, dan sebagainya. Dengan cara tersebut, pemilih dalam menentukan pilihannya dapat berdasarkan pertimbangan rasional yang tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) ataupun menimbulkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang mendapatkan resiko paling kecil (*least risk*), ataupun yang penting mendahulukan keselamatan dirinya atas pilihan tersebut. Meskipun begitu, penilaian terhadap isu dan kandidat bukanlah menjadi faktor utama, terdapat faktor lain yang juga ikut mempengaruhi yakni adanya informasi

terkait isu terhadap para calon atau kandidat yang selalu diterima para pemilih melalui media massa, serta media sosial yang diikutinya. Berita dan komentar-komentar yang dimuat di media massa, serta media sosial khususnya berita atau komentar-komentar negatif, seringkali mempengaruhi penilaian para pemilih terhadap kandidat, posisi kandidat dalam suatu isu, dan preferensi kandidat dalam suatu kebijakan tertentu. Sementara itu, juga ada evaluasi terhadap para calon atau kandidat yang sangat dipengaruhi oleh sejarah serta pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat (KPU Bondowoso; Lemlit UNEJ, 2015, pp. 18-21). Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat yang khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali yakni, kualitas, kompetensi dan integritas terhadap calon atau kandidat tersebut juga termasuk salah satu faktor dalam pendekatan model pilihan rasional perilaku pemilih.

#### PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS UNTUK MOBILISASI SUARA PADA PILPRES 2019 DI PALEMBANG

Bentuk dari politik identitas yang digunakan pada Pilpres 2019 di Kota Palembang muncul karena adanya isu yang berkembang selama masa kampanye melalui sarana media sosial dan mimbar ceramah. Kemudian adanya sentimen agama yang terjadi di masyarakat juga menjadi pemicu adanya bentuk politik identitas pada Pilpres 2019. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) masih menjadi isu yang digunakan dan berkembang di masyarakat selama masa kampanye pemilihan Presiden

2019. Selama masa kampanye masih didominasi oleh kampanye yang mengkapitalisasi isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian, serta terkait isu-isu yang tidak substantif. Kondisi ini juga diperparah dengan masifnya mobilitas kampanye di media sosial, melalui mobilisasi influencer dan pasukan buzzer dalam rangka mempercepat pembuatan dan penyebaran isu. Alih-alih mendorong proses pemilu yang berkualitas, fenomena ini justru semakin menambah polarisasi di masyarakat, bahkan disinyalir semakin mendorong apatisme terhadap pemilu dan menguatnya gerakan mendorong golput. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa di zaman teknologi yang serba cepat ini, yang berakibat seluruh informasi itu langsung dengan cepat dilihat dan dipercaya oleh masyarakat tanpa harus mencari tahu darimana sumber isu tersebut berasal (<https://www.puskapol.ui.ac.id>). Sentimen agama muncul pada Pilpres 2019, setidaknya itu terlihat dari kedua pasangan calon yang “bertarung” pada Pilpres 2019. Dimulai dari Prabowo Subianto dengan mengadakan Ijtima Ulama’ untuk menentukan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi, pada akhirnya mengambil keputusan dengan mengajak Sandiaga Uno menjadi calon Wakil Presiden 2019. Kemudian Joko Widodo dengan mengajak K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019. Mengamati dinamika yang terjadi pada Pilpres 2019 diatas tampak kedua pasangan calon yang terlibat dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencoba mengeksploitasi sentimen keagamaan dalam hal ini Agama Islam untuk meraup suara.

Pemikiran rasional yang mendasari pemanfaatan sentimen keagamaan (Islam) adalah fakta riil di lapangan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Maka yang kemudian terjadi masing-masing pasangan calon berupaya memanfaatkan seefektif mungkin sentimen keagamaan (Islam) dengan cara memanfaatkan simbol-simbol Islam sebagai sarana menarik simpati dan dukungan massa. Beberapa simbol yang dipahami secara umum sebagai simbol-simbol agama Islam diantaranya adalah ka’bah, bulan sabit, ustadz/ulama, ayat-ayat suci Al Qur’an. Dari keempat symbol tersebut yang paling banyak digunakan adalah Ustadz/Ulama dan ayat-ayat suci Al Qur’an. Keduanya, Ustadz/Ulama dan ayat-ayat suci Al Qur’an, lebih banyak tampil sebagai simbol Islam yang dikapitalisasi masing-masing pasangan calon guna memperoleh dukungan politik masyarakat. Dengan kata lain, bentuk politik identitas yang digunakan dalam Pilpres 2019 di Kota Palembang adalah politik identitas keagamaan dalam hal ini agama Islam.

Adapun simbol yang mewakili identitas agama Islam yang paling banyak digunakan adalah Ustadz/Ulama dan ayat-ayat suci Alqur’an. Sentimen agama muncul di Kota Palembang pada pilpres 2019 karena adanya dukungan dari para ulama di Kota Palembang untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Bahkan ada sebuah opini di dalam portal berita mengatakan

“Ada dua faktor yang membuat pasangan Calon Presiden-Wapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di Sumatera Selatan. Pertama isu harga karet dan

populisme Islam. “Masyarakat di Sumsel mayoritas bekerja di bidang agraris, jadi ketika Jokowi dianggap gagal mengangkat harga komoditas karet, sawit dan lainnya, maka masyarakat memberikan ‘sanksi’ dengan mengumpulkan suara ke Prabowo. Sedangkan faktor populisme Islam mulai merembet ke Sumsel sejak muncul aksi 212 dan 411 di Jakarta, kemudian terus berlanjut hingga Pilpres 2019 terutama di Kota Palembang dengan dorongan tokoh-tokoh agama. Bisa dilihat ketika kampanye Jokowi dan Prabowo di Palembang, nampak perbedaannya secara kuantitas sangat jauh” (Pernyataan Alip Dian Pratama, dikutip dari <http://fin.co.id>, diakses tanggal 07 Juli 2020).

Pernyataan dari pengamat politik tersebut dapat dilihat bahwa isu populisme agama sengaja digunakan untuk mendapatkan simpati dan dukungan suara terbanyak dari masyarakat, khususnya Kota Palembang. Kota Palembang mempunyai jumlah pemilih terbanyak pada Pilpres 2019 menurut data KPU RI sebesar 1.200.000 pemilih dari 18 Kecamatan di Kota Palembang.

Selain itu ada juga salah satu ulama atau ustadz terkenal di Kota Palembang yang bernama Ustadz K.H. Ahmad Taufiq Hasnuri. Alm yang pernah secara terbuka pada saat ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Palembang mengatakan bahwa mendukung pasangan calon nomor urut 02 dan video ceramah beliau diunggah di channel youtube. Mereka sangat mendukung dan menghormati dari hasil Ijtima’ Ulama untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02. Pihak pasangan calon yang didukung pun terlihat

optimis dapat meraih suara terbanyak karena melihat ramai dan antusiasnya masyarakat yang ikut hadir dalam acara tersebut. Adanya berita tersebut dapat terlihat bahwa sentimen agama sangat berpengaruh pada situasi dan lingkungan sosial masyarakat, hubungan antar umat beragama, pengangkatan dan pemilihan pemimpin, khususnya pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Palembang. Pada konteks ini, ulama lokal dengan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor 2 dalam banyak kesempatan ceramahnya adalah Almarhum Ustadz Taufiq Hasnuri.

Simbol Islam kedua yang digunakan sebagai sarana menarik simpati dan dukungan massa dari kalangan muslim adalah ayat-ayat suci Al Qur’an. Para ustadz ataupun Ulama simpatisan dan pendukung pasangan Prabowo-Sandi kerap menyetir ayat-ayat Al Qur’an sebagai rujukan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria calon pemimpin yang akan dipilih. Para pemilih pasangan Prabowo – Sandi adalah karena faktor didukung oleh Ulama. Baik itu yang tergabung dalam Ijtima’ Ulama di tingkat pusat atau ulama-ulama lokal yang sering menyampaikan pesan-pesan baik secara eksplisit maupun implisit untuk mendukung pasangan calon nomor 2. Ini dibuktikan dengan adanya narasumber yang di wawancara oleh peneliti seperti berikut

“Karena merasa terpanggil untuk membela agama lewat jalur Pilpres 2019, apalagi banyak dari ustad ataupun ulama yang saya kenal juga memberi masukan untuk memilih 02 agar Indonesia semakin baik dan lebih dekat lagi kepada ajaran agama dan perintah dari Allah SWT” (

wawancara, Damar, Wiraswasta, Warga Kota Palembang, 29 Februari 2020)

Dari jawaban Damar sebagai informan diatas, informan mengatakan bahwa memilih pasangan calon nomor urut 02 karena merasa hati nuraninya terpenggil untuk membela agama Allah. Sentimen agama yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 di Kota Palembang berhasil memberikan keyakinan damar dalam mengambil keputusan memilih pada Pilpres 2019. Peranan ulama ataupun ustad yang mempunyai pandangan dan pilihan politik memilih pasangan calon nomor urut 02 juga sangat mempengaruhi damar dalam mengambil keputusan. Ulama ataupun ustad yang sangat dihormati oleh damar, sehingga segala masukan yang diberikan oleh ulama ataupun ustad yang dia kenal tersebut dapat diterima langsung oleh damar tanpa melihat seperti sisi visi dan misi, track record dan etos kerja dari pasangan calon nomor urut 02.

Informan lain juga menyampaikan pernyataan kepada peneliti pada saat di wawancara tentang alasan informan memilih salah satu paslon karena adanya sentimen agama yang mendasari pilihan politiknya pada Pilpres 2019. Iwan sebagai informan memaparkan :

“Karena kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai warga negara dan pemimpin terhadap warga, jadi saya harus menjadi contoh yang baik untuk warga. Kalau untuk memilih paslon dalam Pilpres 2019, saya memilih paslon 02 karena atas dasar hati nurani dan juga tertarik adanya peran ulama untuk mendukung paslon 02. Simple saja pemikiran saya waktu itu, kalau

ulama sudah bergerak untuk mendukung salah satu paslon berarti ada hal penting yang harus diselesaikan, dan yang bisa menyelesaikan ulama harus ikut bergerak supaya selesai” (wawancara, Iwan, Karyawan Swasta, Warga Kota Palembang, 2 Maret 2020 )

Dari jawaban Iwan sebagai informan diatas yang mengatakan bahwa dia memilih pasangan calon nomor urut 02 karena dia memiliki kesadaran sebagai warga negara dan juga sebagai pejabat negara dalam lingkup RT sehingga harus menjadi contoh baik. Kemudian selain faktor tersebut, Iwan memilih pasangan calon nomor urut 02 karena dia berpikir apabila ulama mengambil keputusan untuk mendukung salah satu paslon, berarti hanya ulama dan paslon tersebut yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Iwan merasa apabila dia memilih sesuai dengan pilihan ulama tersebut berarti dia berusaha telah sedikit membantu dan meringankan ulama dan paslon tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sentimen agama melalui peranan ulama, telah mempengaruhi Iwan dalam menentukan sikap politiknya pada Pilpres 2019. Pemahaman dengan adanya peran ulama dalam mendukung paslon tersebut telah cukup meyakinkan Iwan bahwa ulama berpengaruh besar terhadap pemecahan masalah yang dihadapi bangsa. Tetapi permasalahan yang seperti apa yang dimaksud oleh Iwan tidak diungkapkan secara jelas.

### **Pengaruh Penggunaan Politik Identitas Terhadap Perilaku Pemilih Di Palembang**

Penggunaan simbol-simbol Islam, peran Ulama serta isu kriminalisasi ulama

mampu menggerakkan para pemilih untuk memilih pasangan calon yang di dukung oleh kekuatan Islam formal seperti partai politik Islam dan ormas Islam, maupun non formal yaitu para da'i, ustadz, atau ulama. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Ulama kepada pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan melalui Ijtima' Ulama dengan beberapa rekomendasi yang dihasilkan, serta adanya isu kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh petahana dengan peristiwa dicekalnya Ketua Umum FPI Habib Riziq Shihab sebagai ikon symbolis membenaran isu tersebut, memantik sentimen positif dari para pemeluk Islam di Palembang yang masih kental dengan kepatuhannya terhadap ulama untuk turut mendukung pasangan calon nomor urut 2.

Sepertinya ada pola yang terstruktur dari penggunaan politik identitas sebagai strategi meraup suara dalam Pilpres 2019 di Kota Palembang. Pola struktur yang peneliti maksudkan adalah bahwa ada upaya yang sistematis dalam arti ada strategi yang direncanakan dalam upaya sosialisasi pemenangan pasangan calon yang didukung dalam bentuk semacam perintah atau komando dari sebuah struktur yang terorganisasi yang berbasis Islam dari atas ke bawah untuk memenangkan pasangan calon nomor dua. Artinya penggunaan politik identitas dalam pilpres 2019 dilakukan secara terstruktur, atau direncanakan (*by design*) oleh kekuatan tertentu berdasarkan penelusuran peneliti terhadap informan yang menolak memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang peneliti ajukan. Ada dua orang informan yang menolak memberikan keterangan ketika diwawancara. Salah

satunya beralasan karena masih sakit hati dan kecewa paslon yang di dukungnya kalah dalam skala nasional. Beliau adalah seorang Habib di Palembang yang sering melakukan kajian tentang Islam kepada jama'ah. Yang kedua, Ustadz Muhammad Ihsan Nur Al Hafidz yang selama wawancara seringkali meminta off the record jawabannya. Dari ustadz Muhammad Ihsan Nur Al Hafidz peneliti memperoleh informasi bahwa ada perintah dari pimpinan FPI pusat kepada FPI Palembang dan diteruskan kepada Ustdaz atau Da'i untuk menyelipkan satu atau dua pesan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam setiap kajian atau ceramah selama masa kampanye dan menjelang pemilihan.

Upaya menutupi informasi terkait pertanyaan penelitian tentang politik identitas menegaskan bahwa politik identitas menjadi amunisi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku para pemilih untuk memilih dalam Pilpres 2019. Dan itu terbukti mampu meningkatkan perolehan suara pasangan calon Prabowo-Sandi atas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Palembang dari Pilpres sebelumnya di tahun 2014. Keengganan beberapa informan untuk memberikan informasi secara lengkap mengindikasikan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan berkenaan dengan penggunaan politik identitas secara terstruktur. Sikap menutupi informasi kepada pihak lain dan hanya menjadi konsumsi kelompok sendiri bisa dimaknai sebagai sikap eksklusif.

Jika ditelisik lebih mendalam, alasan pemilih dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berkenaan dengan dua hal, yaitu faktor subyektifitas

dan faktor obyektifitas. Faktor subyektifitas dalam pengambilan keputusan pemilih tidak terlepas dari faktor psikologis dalam hal ini perasaan senang atau tidak senang (kebencian) terhadap calon. Sedangkan faktor obyektifitas terkait dengan penilaian terhadap rekam jejak, penilaian terhadap visi, misi serta program yang terukur dan mempunyai kemungkinan keterlaksanaan (fisabilitas) dan bisa dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Sebagai individu setiap pemilih mempunyai kehendak bebas dalam memutuskan sikap politiknya. Sekalipun demikian kehendak bebas dalam pemilihan umum diharapkan di landasi pertimbangan rasional obyektif. Mengingat keputusan politik dalam memilih akan menentukan nasib bersama lima tahun ke depan. Jika pengambilan keputusan politik itu dilakukan secara emosional dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap masa depan kehidupan bersama. Dalam batas-batas tertentu, ketidaksukaan atau dalam bahasa lain kebencian terhadap pasangan calon bisa disebabkan karena kekecewaan terhadap pasangan calon tersebut. Banyak alasan munculnya sikap kecewa ini, bisa jadi karena menyangkut persoalan pribadi, misal tidak dapat bantuan langsung tunai, bisa juga menyangkut kepentingan kelompok, misal perasaan kelompoknya diperlakukan tidak adil. Isu terkait kriminalisasi ulama yang dihembuskan pasangan calon nomor urut 2 terhadap pasangan calon nomor urut 1, bisa disebut mewakili sikap kekecewaan tersebut. Sikap kecewa ini sengaja dikapitalisasi sebagai bagian dari upaya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pasangan nomor urut 1. Sikap ini pula yang

diharapkan muncul dari kalangan pemilih sehingga mereka diharapkan tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 dan lebih memilih pasangan nomor urut 2. Hal itu berlaku juga terhadap isu antek asing, dan isu PKI, semuanya adalah strategi membangun ketidaksukaan atau kebencian terhadap pasangan calon yang diisukan.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan narasumber di bawah ini:

“Saya sadar ini kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai warga negara jadi saya harus ikut untuk memilih. Untuk menentukan pilihan dalam Pilpres, saya melihat informasi dan berita terkait pencalonan pak Prabowo dan wakilnya lewat Ijtima’ Ulama. Dari itu saya menentukan pilihan untuk memilih paslon 02, karena saya merasa bangga dan sedih saja untuk menentukan paslon harus melalui ulama dahulu. Berarti ada yang harus diselesaikan di Indonesia ini dan ulama harus ikut untuk membereskan, dan saya harus ikut bersama ulama untuk ikut membantu membereskannya. Kira-kira seperti itu alasan saya untuk memilih paslon 02” (Irawan, 2020).

Bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan di Indonesia untuk itu peran ulama harus dilibatkan dalam menyelesaikannya, inilah alasan yang mendasari pilihan Abdullah Irawan terhadap pasangan Prabowo-Sandi.

Di lain pihak, fakta temuan peneliti tentang perasaan kekhawatiran akan adanya intimidasi terhadap minoritas Tionghoa jika pasangan nomor urut 2 menang, adalah bentuk phobia yang tidak cukup beralasan. Menurut peneliti harus dilakukan kajian

lebih mendalam untuk mengungkap fakta empirisnya. Meskipun demikian hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup kuat bagi kalangan Tionghoa yang mendasari ketidaksukaannya terhadap pasangan nomor urut 2 itu dan kemudian memilih pasangan nomor urut 1.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber keturunan Tionghoa:

“Karena saya dari kelompok minoritas keturunan Tionghoa, dan juga pada waktu itu saya merasa, melihat dan membaca seperti ada rasa kebencian yang disebarkan dari orang-orang yang bukan keturunan Tionghoa ketika melihat orang-orang yang mempunyai keturunan Tionghoa. Jadi saya merasa harus ikut terlibat dalam Pilpres 2019 ini, karena jujur saya merasa takut akan adanya intimidasi terhadap saya dan orang-orang keturunan Tionghoa apabila pasangan 02 menang. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih pak Jokowi karena saya merasa aman apabila beliau menjadi Presiden lagi” (Leni, 2020).

Selain ibu Leni yang mengatakan hal tersebut kepada peneliti, ada informan lain yang mengatakan pernyataan yang maksud dan isinya hampir mirip dengan yang dimaksud oleh ibu Leni. Ibu Risnawati sebagai informan mengatakan bahwa :

“Karena saya sadar itu kewajiban sebagai warga negara jadi harus ikut aktif memilih. Saya memilih pak Jokowi karena saya sadar, sebagai orang yang berasal dari kelompok minoritas Tionghoa harus memilih beliau yang menurut saya sangat melindungi hak-hak dari kelompok minoritas seperti saya ini. Jadi tidak bakal ada intimidasi, diskriminasi, dan persekusi

yang akan saya alami maupun teman-teman yang satu kelompok minoritas dengan saya. Apalagi dari pendukung pasangan 02 yang selalu terlihat benci ketika melihat orang-orang dari kelompok minoritas seperti saya ini. Mohon untuk jangan direkam ya mas, jujur saya takut kalau direkam. Tapi kalau dicatat tidak apa-apa, saya masih memaklumi cuma jangan dilebih-lebihkan kata-katanya mas” (Risnawati, 2020).

Nuansa politik identitas yang kental terasa dalam Pilpres 2019 yang sama-sama dikembangkan oleh kedua pasangan calon, tampaknya mempengaruhi sikap dan pertimbangan rasional para pemilih. Opini yang dibangun melalui politik identitas kurang memberi ruang bagi pendalaman rekam jejak, visi, misi dan program dari pasangan calon. Upaya memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui bedah visi, misi dan program guna melahirkan perilaku politik yang rasional obyektif sebagai bentuk kedewasaan politik sulit terwujud. Politik identitas mereduksi fungsi kampanye dialogis sebagai ajang adu gagasan tentang apa yang hendak dikerjakan setelah seseorang memegang jabatan selama 5 tahun ke depan, beserta target-target capaian yang akan diperoleh dalam jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Bagi pemilih Prabowo-Sandi rasionalitas pilihan tentu saja tidak bisa menggunakan parameter yang sama yang di pakai oleh para pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab Prabowo-Sandi tidak punya rekam jejak yang bisa disandingkan dengan petahan karena belum pernah menjabat. Menyadari perbedaan kondisi seperti itu, kubu pasangan Prabowo-

Sandi mencari rasionalitas lain yang mempunyai pengaruh kuat dalam meningkatkan elektabilitas keduanya. Mereka mencoba mengkalkulasi sentimen negative dari pesaingnya yaitu pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, dan pada saat yang sama menggali sentimen positif dari para pemilih.

Menurut pandangan peneliti pilihan untuk mengembangkan isu tentang antek asing, PKI, kriminalisasi ulama yang dialamatkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah pilihan strategi yang harus dipilih. Sebab isu-isu tersebut bisa memberi efek negatif bagi pasangan pesaingnya tersebut dan pada saat yang sama membangkitkan sentiment positif dari rakyat pemilih. Dan terbukti hal tersebut berhasil mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi. Hal yang berpotensi terjadi kedepannya adalah pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata, akan tetapi dengan bermodalkan latar belakang, minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas. Sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik bukan dilawan. Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan

sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat.

### **Simpulan**

Bentuk politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Palembang menggunakan agama sebagai "alat" untuk mempengaruhi masyarakat, memang benar terjadi. Masyarakat seperti dibuat menjadi dua pihak yang seakan berkonflik. Politik Identitas juga seakan tumbuh dan berkembang dengan cepat melalui proses komunikasi politik yang intens setiap harinya. Sehingga masyarakat setiap harinya seakan disuruh untuk terus berpikir dan terpengaruh dalam setiap pengambilan keputusannya. Pemilihan Presiden 2019 juga menjadi bukti bahwa bentuk dari politik identitas khususnya agama, dijadikan alat untuk mempengaruhi setiap keputusan masyarakat dalam memilih. Terbukti bahwa adanya informan yang mengatakan memilih pasangan calon nomor urut 2 karena faktor didukung oleh sebagian ulama, dan umat muslim. Sehingga membuat informan kagum dan senang kepada pasangan calon tersebut karena merasa pilihan yang terbaik oleh para ulama dan umat muslim di Kota Palembang. Peran media sosial juga berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya. Informasi yang sangat cepat disebarluaskan oleh para tim sukses dan buzzer dari kedua pasangan calon, terbukti efektif dan efisien untuk mendapatkan massa pendukung pada Pilpres 2019 ini. Banyak dari informan yang juga terpengaruh adanya penyebaran berita dan isu politisasi agama melalui media sosial. Selain itu, peran dari ulama ataupun ustadz yang melakukan ceramah kepada masyarakat juga menjadi

faktor pendorong berhasilnya politik identitas agama di Kota Palembang. Ada beberapa informan yang menyatakan mendukung pasangan calon nomor urut 02 karena terpengaruh dari isi cereamah yang disampaikan ustadz atau ulama yang dilihat.

Adapun dampak dari adanya politisasi agama terhadap perilaku politik masyarakat di Kota Palembang terbukti efektif. Banyak dari informan yang mengatakan bahwa perilaku politik mereka dalam menentukan pilihan didasari atas adanya politisasi agama yang berkembang di kehidupan masyarakat. Akan tetapi, adanya

politik identitas di masyarakat seakan menutup tingkat rasionalitas dari para pemilih untuk menentukan pilihan. Hal ini takutnya akan berdampak kepada Pemilihan Umum periode berikutnya. Dapat berdampak kepada tingkat demokrasi di Indonesia, karena orientasi dari para pemilih tersebut akan beralih kepada kesamaan identitas, dan bisa saja jika hal ini akan terus berlanjut akan muncul konflik baik itu di daerah ataupun nasional karena adanya kelompok minoritas yang menjadi warga negara merasa tidak mendapatkan keadilan dengan kelompok mayoritas dalam hak kehidupan kewarganegaraan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Farida, I. d. (2019). Peran Sungai Musi Dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda. *Jurnal Sejarah Perkembangan Islam UIN Raden Fatah Palembang*, 3(1).
- Haryanto. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*, 17(3), 292.
- Hidayatullah.com*. (2018, October 2019). Retrieved September 18, from Anis, "Ijtima Ulama Sumsel Tegaskan Hasil Ijtima Ulama Jakarta: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/10/05/152089/ijtima-ulama-sumsel-tegaskan-hasil-ijtima-ulama-jakarta.html>
- indonesia.go.id. (2020, Juli 07). *Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia*. Retrieved from <https://indonesia.go.id/>: <https://indonesia.go.id/profil/suku>
- Irawan, A. (2020, March 2). Pemilihan Presiden 2020. (F. A. Rif'an, Interviewer) Palembang.

- Kanwil Kemenag Sumsel. (2019, Oktober 15). Retrieved July 03, 2021, from Direktory Data Keagamaan: <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43725/direktory-data-keagamaan->
- Kinanti, F. (2018, September 18). *Pelintir Informasi Soal Pengaturan Volume Adzan, Ada Provokasi di Masyarakat Palembang*. Retrieved September 17, 2019, from <https://www.kompasiana.com>:  
<https://www.kompasiana.com/fannykinanti1458/5b9eff35bde5752aed796628/pelintir-informasi-soal-pengaturan-volume-adzan-ust-ahmad-taufiq-hasnuri-provokasi-masyarakat-di-palembang?page=all>
- KPU. (2019). *Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2019*. Jakarta: kpu.go.id. Retrieved January 15, 2020, from <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>
- KPU Bondowoso; Lemlit UNEJ. (2015). *Perilaku Pemilih*. Bondowoso: KPU Bondowoso.
- Leni. (2020, Febuari 23). Perilaku Pemilih etnis Tionghoa. (F. N. Rif'an, Interviewer) Palembang.
- Maarif, A. S. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Jakarta: Maarif Institute.
- Muhtadi, B. (2018). *Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional*. Jakarta: Maarif Institute.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2009). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Putriasafa, N. (2016). *Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015 (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung)*. Lampung: diglib.unila.ac.id.
- Risnawati. (2020, Febuary 24). Perilaku Pemilih Pilpres 2019. (F. N. Rif'an, Interviewer) Palembang.
- Roth, D. (2009). *Studi Pemilu Empiris; Sumber Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Sahalatua, A. P. (2018). *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah; Studi Kasus pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022*. Serang: Universitas Sultan Ajen Tirtayasa.
- Setyaningrum, A. (2005). *Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial Politik perlawanan*. Yogyakarta: IRE.
- Wardah VOA, F. (2018, September <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>). *Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga*. Retrieved from VOA Indonesia:

<https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>